

BAB I

AWAL PERKENALAN

“Belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan, belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh seorang yang bukan penakut”

ANWAR FUADI

1.1 Pengantar

Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan pada orang lain dan dijadikan sebagai pegangan dalam hidupnya. Kehidupan tidak hanya tentang mencari harta, mengejar kedudukan, mencari kesenangan namun juga tentang bagaimana mencari ilmu untuk hidup selanjutnya. Ilmu yang dapat dijadikan bekal dan sebagai jalan untuk kembali pada yang Maha Pencipta. “Ilmu bukan di lihat dari siapa yang memberikan, tapi apa isi dari penyampaiannya”, kata-kata ini memberikan arti bahwa siapapun yang memberikan ilmu, anak kecil, teman sejawat, orang dewasa ataupun orang tak dikenal sekalipun, hal itu tetaplah ilmu yang harus dipelajari dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru.

Keutamaan suatu ilmu adalah sebagai perantara menuju ketakwaan yang menyebabkan seseorang mulia di sisi Allah SWT. Sebagaimana syair Muhammad bin Hasan bin Abdillah *“Jadilah dirimu sebagai orang yang berfaedah, yang selalu menambah ilmu setiap hari dan berenanglah di samudera faedah”*. Allah memuliakan Nabi Adam atas para malaikat karena ilmu yang dimilikinya. Manusia yang baik adalah manusia yang dapat mencari ilmu dan dapat mengambil manfaat dari ilmu yang diperolehnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mengantarkan kita pada tujuan yang diinginkan dan memberikan kedamaian dalam menjalani proses dalam mencapai tujuan.

Pada bab ini merupakan suatu awal dari perjalanan untuk mencapai tujuan. Bab ini hanya menceritakan apa yang akan peneliti bahas dan tujuan apa yang ingin peneliti dapatkan dalam melakukan penelitian.

1.2 Latar Belakang

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh dana dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (Hendrawan, 2011). Organisasi nirlaba juga tidak berfokus pada keuntungan, namun lebih memperhatikan pada jumlah kas yang diterima dari sumbangan para donatur yang tidak mengharapkan manfaat untuk dirinya sendiri, namun ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah (Nariasih, 2015). Kemampuan organisasi dalam memberikan jasa dikomunikasikan melalui posisi laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang dana dalam pengeluaran dan pendapatan. Dalam teorinya, akuntansi untuk organisasi nirlaba tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis, namun dalam pengaturannya diatur secara mandiri dan sesuai kebijakan masing-masing pengelola. Selain itu dalam organisasi nirlaba juga tidak ada pihak yang menjadi pemilik, sehingga tidak ada transaksi yang berhubungan dengan penjualan atau perubahan kepemilikan.

Praktek akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga nirlaba lainnya merupakan sesuatu yang tidak lazim. Menurut Irvine dalam Simanjuntak (2011) menyimpulkan bahwa, pendeta dan orang awam percaya bahwa akuntansi tidak mengganggu agenda suci yang dikerjakan oleh gereja, sebaliknya akuntansi adalah bagian yang penting yang terintegrasi dengan kepentingan Gereja untuk mencapai misi kudus, karena Gereja berkepentingan dengan peningkatan dana

dan manajemen keuangan yang baik untuk mencapai misinya. Begitu pula pengelolaan keuangan pada masjid juga diperlukan untuk memberikan rasa kepuasan pada jamaah. Kepuasan ini dapat dicapai dengan akuntabilitas yang baik sesuai islam.

Begitu banyak organisasi masjid yang tidak membuat pelaporan keuangan dalam pelaksanaannya. Para pengelola tidak menyadari bahwa hal seperti ini dapat menimbulkan kecurigaan pada masyarakat, ketidakpercayaan bahkan sampai pada perpecahan antara pengurus masjid dengan warga. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa begitu sensitifnya masalah keuangan dan aset dari suatu organisasi agama (Simanjuntak dan Januarsi, 2011). Hal ini harus dijadikan pelajaran, bahwa pertanggungjawaban keuangan didalam pengelolaannya juga harus dilaksanakan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Rumah ibadah dapat dikatakan sebagai entitas yang memiliki kepentingan dalam membuat laporan keuangan. Hal ini dikarenakan rumah ibadah memenuhi asumsi dasar pelaporan keuangan, yaitu jamaah yang menyumbangkan hartanya di sebagai aktivitas ibadah dan terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharanya (Nugraha, dkk 2014). Hal ini mendorong para pemangku kepentingan masjid melakukan laporan keuangan untuk memberikan keyakinan pada jama'ah bahwa infaq atau harta yang telah jama'ah sumbangkan telah di gunakan sebaik-baiknya.

Penjelasan diatas memberikan pemahaman, bahwa pelaporan keuangan hanya sebagai penengah antara pengelola masjid dengan jamaah. Pengelola masjid pasti mengelola dana jamaah sesuai kebutuhannya dan tidak akan mungkin pengelola masjid berkhianat atau melakukan kecurangan, namun disini jamaah hanya ingin

mengetahui sistem pelaporan akuntansinya, baik itu pendapatan atau biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan organisasi masjid (Simanjuntak dan Januarsi, 2011). Hal ini setidaknya dapat memberikan kepercayaan masyarakat pada pengurus masjid bahwa dana yang diterimanya disalurkan dengan baik dan tidak merasa ragu untuk menyumbang.

Tuntutan dalam keterbukaan dan melaksanakan akuntabilitas dalam organisasi masjid memang harus dilakukan untuk memberikan keyakinan pada jamaah bahwa tidak ada penyelewengan dana dalam pengelolaannya. Akuntabilitas dalam rumah ibadah terdapat pada pelayanan dengan melakukan pencatatan, pelaporan dan pengevaluasian. Dalam kenyataannya, beberapa masjid masih terkesan tertutup dalam pelaporannya yang membuat para jamaah merasa tidak ada kepercayaan lagi (Silvia dan Anshar, 2011). Keraguan dan krisis kepercayaan yang disebabkan kurangnya dan akuntabilitas laporan keuangan dapat mempengaruhi tingkat pemberian donatur. Hal ini akan menyulitkan masjid untuk menjalankan kegiatan operasionalnya (Anheir dan Wehrsig, 2001) dalam Gultom (2015). Transparan dan akuntabilitas diperlukan agar pengguna laporan keuangan mengetahui pada kondisi dan kinerja masjid. Melalui penyajian yang transparan dan akuntabel pengguna laporan keuangan dapat ikut serta dalam meminimalisir kecurangan yang dilakukan pihak pengurus (Gultom, 2015).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaannya, maka dibutuhkan pelaporan keuangan yang meliputi transaksi keuangan mengenai sumber daya, pendapatan dan beban (Zoelislisty dan Adityawarman, 2014). Pelaporan ini dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

seperti donator dan jamaah untuk mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan bermanfaat. Untuk mewujudkan lembaga keuangan masjid yang profesional dibutuhkan pengelolaan yang berbasis manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan dalam membuka data dan informasi pengelolaan keuangan masjid dimulai dari penerimaan dana hingga penyaluran dana.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Januarsi (2011) tentang Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Baitusalam, Tangerang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa laporan keuangan dibuat secara sederhana dan hanya berbentuk empat kolom yang terdiri dari uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pengurus menyadari tentang pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk kejujuran dan pertanggungjawaban, hal ini untuk menjaga kehormatan, nama baik dan citra para pengurus terhadap para jamaah. Pengurus juga menyadari, bahwa bimbingan dari para akuntan sangat dibutuhkan untuk mengajarnya dalam mendesain pembuatan laporan keuangan secara baik agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid. Kebudayaan yang unik di masjid Baitusalam, yaitu para masyarakat yang masih mengaggap bahwa akuntansi yang mendorong dan akuntabilitas dianggap sebagai perilaku yang riya', hal ini dibutuhkan dorongan dalam perubahan anggapan masyarakat agar mereka menyadari bahwa akuntansi hanya sebagai penengah diantara pengurus dan masyarakat agar tercipta kemakmuran dalam beragama. Penelitian dilakukan oleh Latif (2014) yang melakukan penelitian di Masjid Nurul Huda, Polanharjo dan hasilnya menunjukkan bahwa pengurus telah menerapkan praktek akuntansi walaupun masih metode

sederhana dan dicatat pertahun. Walaupun masyarakat sangat percaya pada pengurus, namun dalam prakteknya pengurus tetap bertanggungjawab pada pengelolaan keuangan yang diamanahkan dan tetap transparan dalam pencatatannya.

Peneliti tentang akuntabilitas keuangan pada masjid juga diteliti oleh Ningsih (2015) tentang akuntabilitas lillahita'ala pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pembuatan keputusan. Pengurus membuat keputusan sesuai dengan kebiasaan sehari-hari dan bisa berubah sewaktu-waktu. Para pengurus yayasan tetap meneguhkan keyakinan dalam hati bahwa pengurus dapat bertanggungjawab dan menjaga amanah yang telah diberikan para jamaah. Nilai yang terkandung dalam pengelolaan keuangan yaitu nilai patuh, nilai adil, nilai bertanggungjawab, nilai terbuka dan nilai jujur. Nilai-nilai tersebut yang pada akhirnya menghasilkan sebuah akuntabilitas lillahita'ala dan tolak ukurnya hanya kepada Allah. Penelitian juga dilakukan oleh Zoelisty dan Adityawarman (2014) yang melakukan penelitian pada masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro. Penelitian ini menghasilkan suatu model pengelolaan dana masjid yaitu nilai amanah. Sebagai bentuk pengendalian internal, pengurus masjid dalam mengelola dana mengedepankan sikap amanah sesuai Islam, hal inilah yang menjadi dasar keyakinan dan rasa bertanggungjawab pengurus untuk terhindar dari penyelewengan dana masjid.

Penelitian serupa juga diteliti oleh Hanafi (2015) yang melakukan penelitian di Masjid Nurusy Syifa' Surakarta. Hasil dari penelitian adanya penerapan nilai-nilai

islam dalam akuntabilitas keuangan seperti amanah, ikhlas, tanggungjawab dan bekerjasama. Nilai-nilai ini saling mempengaruhi sikap, keyakinan, serta tingkah laku pengurus.

Peneliti mengambil situs penelitian pada Masjid Agung Bangkalan karena berada di kawasan kota, selain itu gelar dari Masjid Agung sebagai Masjid Jami' utama tingkat Kabupaten. Masjid ini dapat dijadikan patokan bagi Masjid yang lain dalam melakukan pengelolaan keuangan juga menjadi patokan bagi masjid-masjid lainnya dalam melakukan perbaikan program sosial dan keagamaan. Selain itu, ketika peneliti diperbolehkan untuk melakukan penelitian dan mengetahui laporan keuangan yang dimiliki masjid. Maka, peneliti mempunyai alasan yaitu untuk mengetahui dari mana perolehan pendapatan masjid yang menembus Rp 500.000.000,- dan untuk mengetahui pengeluarannya. Menurut Bapak Zain yang merupakan bendahara masjid, selama ini pengelolaan keuangan yang dilakukan hanya sesuai kebiasaan dan tidak ada aturan tertulis. Walaupun demikian, pelaporan keuangan setiap tahunnya tidak ada perubahan prosedur pembuatan.

Organisasi Masjid Agung Bangkalan mempunyai tiga bendahara, hal ini dikarenakan memang adanya suatu keharusan dari struktur-struktur sebelumnya bahwa dalam setiap kepengurusan harus sepuluh orang yang terdiri dari satu ketua, tiga wakil ketua, tiga sekretaris dan tiga bendahara. Kepengurusan seperti ini hanya sebagai formalitas saja. Pemegang kekuasaan untuk membuat laporan keuangan merupakan bendahara I, hal ini sesuai dengan kebijakan para pengurus yang beralasan agar setiap pengeluaran dan pendapatan langsung dicatat oleh bendahara I tanpa harus melalui bendahara lainnya.

Akuntabilitas keuangan pada Masjid Agung Bangkalan dalam pengelolaannya dilakukan sesuai kebiasaan. Perhitungan kotak amal yang dilakukan perminggu dicatat dalam pembukuan setiap bulan dan pertahun dengan bentuk sederhana. Laporan keuangannya hanya terdiri dari pendapatan rutin, pendapatan non rutin, pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin. Pencatatan keuangan hanya ditulis dengan memisahkan antara penerimaan dan pengeluaran, namun sudah menggunakan Microsoft office excel dalam pencatatannya. Untuk pengelolaan sumber daya, lahan yang diwakafkan untuk dimasjid oleh pengurus dimanfaatkan untuk mendapatkan dana tambahan, seperti tempat sewa toko, sewa rumah dan gedung-gedung kepemilikan masjid dijadikan sebagaia sarana untuk dijadikan tempat mengajar yang nantinya para guru akan memberikan sejumlah dana sewa untuk masjid.

Akuntabilitas bagi sebagian orang tidak diperhatikan, hal ini karena mereka menganggap bahwa apapun yang dikerjakan manusia itu pertanggungjawabannya langsung kepada Allah. Sebagai pengurus masjid yang mengetahui hukum Islam secara baik, pengurus mengetahui bahwa apapun yang dilakukannya semata-mata untuk mendapat ridho Allah. Walaupun antara masyarakat dan pengurus saling percaya, namun antara keduanya juga masih membutuhkan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada jamaah. Pengelolaan tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang dibuat pengurus dan disampaikan pada jamaah secara jujur. Peneliti tertarik untuk mengetahui kajian dalam pengelolaan keuangan pada masjid yang merupakan organisasi nirlaba yang harus memberikan laporan keuangan secara teratur sebagai bentuk tanggung jawab

mereka pada jamaah sebagai penyumbang. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ingin mengetahui tentang bentuk nyata pelaporan keuangan yang dilakukan pengelola masjid, selain itu juga untuk mengetahui dari praktek akuntabilitas dan dari para pengelola untuk para masyarakatnya.

1.3 Rumusan Masalah

Jika amanah dapat dijalankan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat pun akan didapatkan. Hal ini akan memberikan pengaruh positif bagi pemegang amanah dalam melakukan tugasnya. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang peneliti ingin ketahui. Peneliti ingin mengetahui : Bagaimana akuntabilitas keuangan Masjid Agung di Kota Bangkalan, Madura ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam setiap pertanyaan dibutuhkan juga jawaban untuk dapat memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas keuangan pada Masjid Agung di Kota Bangkalan, Madura.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu baru yang bermanfaat, antara lain :

Manfaat Teoritis dan Aplikatif

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan masjid, selain itu juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti berkaitan dengan “Akuntabilitas Keuangan Masjid”.

Manfaat Praktis

1. Bagi pengelola masjid

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi masjid dalam pengelolaan keuangannya selama ini dan diharapkan dapat mengambil manfaat untuk menjadi lebih baik dalam standar pengelolaannya.

2. Bagi jamaah

Bagi para jamaah, penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan tentang pelaporan keuangannya dan jamaah dapat mengetahui aliran dana yang masuk dan keluar tanpa merasa khawatir tentang infaq dan amal yang dilakukannya.